

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan sebuah cerita panjang dan tidak mudah. Perempuan yang berkecimpung di dunia politik sesungguhnya telah terlibat jauh sebelum kemerdekaan dan konsep demokrasi diterapkan di Indonesia. Pergerakan perempuan dalam politik telah muncul melalui berbagai gerakan berbentuk organisasi-organisasi perempuan hingga keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan. Namun, peran perempuan dalam politik dilihat dari data dan fakta yang tersedia, belum menempatkan politisi perempuan dalam konteks keadilan politik yang sesungguhnya.

Serangkaian hambatan terus muncul seiring pergerakan yang dilakukan perempuan dalam dunia politik. Menurut United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia (2010: 37) terdapat berbagai isu dan tantangan utama terhadap partisipasi politik perempuan mulai dari tantangan yang bersifat diskursif, hambatan sosio-ekonomi, hambatan politis dan kelembagaan, hingga hambatan pribadi dan psikologis.

Namun, secara umum hal penting yang mendasari berbagai hambatan tersebut adalah kultur masyarakat patriarkis yang telah mapan menjadi sebuah ideologi dalam politik. Pemisahan ruang yang berdasarkan jenis kelamin tersebut memposisikan perempuan sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab utama dalam wilayah domestik atau rumah tangga. Sementara laki-laki mempunyai peran umum yang lebih leluasa pada wilayah publik.

Kultur patriarki yang telah melekat tersebut mengakibatkan munculnya ketidakadilan yang bukan hanya terjadi pada perempuan tetapi juga pada kemanusiaan (Nugroho, 2001; Perdana, 2012: 1). Masalah ketidakadilan tersebut merupakan substansi penting mengenai keterwakilan perempuan dalam ruang publik terutama politik. Padahal dalam mewujudkan tatanan demokrasi yang sesungguhnya tanpa ketidakadilan tersebut, maka perspektif politik Indonesia harusnya mewujudkan politik yang ramah *gender*.

Upaya membangun perspektif politik yang ramah *gender* tersebut salah satunya diwujudkan melalui perbaikan sistem agar keterwakilan politik perempuan terus mendapatkan ruang dalam proses pengambilan keputusan publik, seperti yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan tentang terpenuhinya kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai pengurus pusat partai politik maupun pencalonan anggota legislatif.

Kebijakan dalam keterwakilan perempuan tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk membangun diskursus yang positif dalam usaha untuk mewujudkan keadilan dalam bidang politik. Kondisi tersebut membuat eksistensi perempuan dalam berbagai lembaga politik bukan lagi menjadi suatu hal yang aneh dan asing apabila dibandingkan dengan sebelum ditetapkan kebijakan tersebut.

Namun, pada kenyataannya spirit akan asas proporsional, kesetaraan dan keadilan yang digaungkan saat ini masih jauh dari titik pencapaian yang diinginkan. Hal tersebut dapat terlihat dari perbedaan jumlah yang cukup besar antara kepala pemerintahan laki-laki dibandingkan perempuan. Seperti yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik dalam persentase Kepala Desa menurut jenis kelamin pada tahun 2014. Jumlah kepala desa perempuan adalah 4.485 orang berbanding jauh dengan kepala desa laki-laki yang mempunyai jumlah 74.251 orang. Dengan kata lain, dari 100 orang kepala desa, 94 orang adalah laki-laki dan hanya 6 orang perempuan (BPS, 2015).

Ketimpangan tersebut bukan hanya dapat ditelaah melalui nilai kuantitatif semata. Permasalahan serius lain yang patut menjadi fokus dalam ketidakadilan pada ranah politik adalah mengenai komunikasi politik terutama kaitannya dengan media massa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat memberi perubahan yang besar terhadap cara warga negara dalam menerima, mengolah, maupun memberi informasi. Media massa menjadi unsur penting dalam membentuk pemahaman dalam masyarakat. Media massa menjadi tempat penyalur aspirasi atau pikiran masyarakat yang berfungsi untuk memberikan informasi dan mengetahui fakta yang terjadi di masyarakat.

Namun, konstruksi sosial-budaya kerap membuat perempuan yang terlibat dalam politik dibingkai dengan deskripsi yang terkesan negatif atau merendahkan oleh media massa. Menurut Braden (dalam Subiakto dan Ida, 2012: 159), kandidat politisi dan pemimpin perempuan seringkali mengalami *media abuse* menggunakan “*gender-specific terms*”. Perbedaan jenis kelamin menjadi hal yang dijadikan subjek perbedaan gender negatif oleh media dalam membingkai perempuan dalam politik.

Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi perempuan yang terlibat dalam ranah politik karena perempuan dianggap sebagai alat legitimasi politik yang dipandang hanya sebagai suatu komoditi semata. Menurut Kravis, Sidney dan Davis, Dennis (Hamad, 2004: 37) mengemukakan bahwa media massa dinilai memiliki kekuatan yang besar dalam menyebarluaskan pesan-pesan politik, melakukan sosialisasi politik, dan membentuk opini publik. Sehingga wajar jika khalayak cenderung mempunyai persepsi bahwa kaum perempuan yang ikut serta dalam kepemimpinan politik tetap merupakan perempuan yang sulit mengambil kebijakan, terikat dengan masalah domestik (keluarga), hingga terlabeli dengan pandangan sebagai kaum yang lemah.

Pemberian bingkai oleh media terhadap kepemimpinan perempuan dalam bidang politik yang tidak seimbang tersebut juga seiring dengan sempitnya ruang gerak perempuan untuk menyampaikan pesan sebagai komunikator politik pada media massa. Pesan-pesan politisi perempuan menjadi minoritas dalam dominasi pesan politisi laki-laki yang seringkali dijadikan rujukan oleh media massa.

Kurangnya akses ke ruang publik tersebut menimbulkan kesempatan para pemimpin perempuan dalam bidang politik untuk membangun citra menjadi kurang maksimal. Sehingga jika terdapat kesempatan untuk mengkomunikasikan pesan tersebut di media massa, kepala-kepala daerah perempuan harus dapat memanfaatkan hal tersebut sebaik mungkin demi kepentingan pencitraan politik. Politik sebagai arena persaingan yang ketat menuntut setiap pemainnya untuk aktif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi politiknya terutama dalam media. Salah satu tujuan utamanya adalah membangun citra diri. Pencitraan ini tentu amat penting karena berkaitan dengan kelangsungan karir politik yang akan dijalani.

Keterkaitan antara citra dengan komunikasi politik yang dilakukan oleh pemimpin politik perempuan tersebut juga dapat membawa pesan kepada khalayak tentang penggambaran pemimpin politik perempuan yang lebih berimbang. Para perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan politik tersebut dapat membawa pesan bahwasanya kehadiran mereka dalam proses pengambilan kebijakan publik akan membawa atmosfir baru dalam politik yang selama ini bernuansa maskulin.

Dalam banyak studi telah dijelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan akan memberikan perbedaan yang positif. Menurut Noris (Subono, 2009: 56-61), perempuan memiliki gaya politik yang meski jauh dari sistematis tetapi berperilaku lebih *compassionate*, *caring*, dan *collaborative* bila dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, arah perubahan kebijakan yang dilaksanakan juga memuat kebutuhan khusus perempuan. Isu-isu tersebut misalnya seperti kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan sosial, maupun perlindungan anak. Selain itu, partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan politik juga menurunkan potensi diskriminasi atas perempuan yang kerap terjadi di ruang publik (Soetjipto, 2005: 98).

Terciptanya suatu citra yang baik di mata publik akan berdampak besar pada tujuan yang ingin dicapai. Apalagi dalam politik, citra tentu erat kaitannya dengan dukungan dari masyarakat yang menjadi penentu arah pergerakan politik para kepala daerah tersebut. Namun, apa yang coba dibangun oleh para kepala daerah perempuan tersebut kerap kali berbenturan dengan berbagai kepentingan media.

Media massa yang menjadi salah satu kekuatan besar dalam pembentukan makna tersebut adalah televisi. Televisi amat diminati oleh khalayak, karena televisi dapat berada di ruang pribadi sekalipun. Kekuatan televisi dalam memengaruhi khalayaknya tidak perlu diragukan lagi. Menurut Dwyer (Triyono, 2010: 150), seorang pakar pertelevisian, pemirsa televisi setidaknya mampu mengingat 50% materi walaupun hanya satu kali ditayangkan oleh televisi.

Kekuatan tentang apa yang ditampilkan oleh televisi dipandang sebagai wujud dari sebuah fakta dan dapat dipercaya oleh masyarakat, padahal hal tersebut tentu tidak selalu benar. Pandangan yang diberikan oleh televisi dapat

dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan ideologi, terutama oleh kelompok dominan. Dominasi tersebut dapat dilihat dari bagaimana media membangun citra perempuan melalui berbagai berita maupun program yang ditampilkannya.

Salah satu program televisi yang mengangkat perempuan dalam politik dari sisi yang berbeda adalah program spesial hari Kartini yang bertajuk “Kartini Pemimpin Negeri” di Metro TV. Pada program tersebut terdapat lima kepala daerah perempuan yang diundang sebagai narasumber. Dalam acara yang berdurasi selama 60 menit tersebut para kepala daerah diperkenalkan kepada khalayak melalui tayangan-tayangan kegiatan yang telah dilakukan, prestasi, latar belakang, hobi, hingga pertanyaan seputar kebijakan pemerintahan yang telah mereka buat. Bahkan, dalam program tersebut juga disajikan bagaimana para perempuan tersebut juga merupakan manusia biasa yang memiliki hobi, makanan kegemaran, dan kebiasaan mereka sehari-hari.

Terdapat lima narasumber kepala daerah perempuan yang diundang hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Pandeglang yaitu Irna Narulita, Walikota Tangerang Selatan yaitu Airin Rachmi Diany, Bupati Luwu Utara yaitu Indah Putri Indriani, Bupati Karawang yaitu Cellica Nurrachadiana, dan Bupati Kutai Kartanegara yaitu Rita Widyasari.

Pada program tersebut terlihat para kepala daerah perempuan tersebut mencoba untuk membangun suatu citra di depan khalayak melalui apa yang mereka sampaikan dan lakukan. Bahwa peran mereka dalam politik bukan hanya sebagai alat politik semata atau hanya dalam upaya memenuhi kepentingan berbagai pihak. Beberapa pernyataan dan sikap yang ditampilkan mencoba menampilkan sisi perempuan yang dapat memimpin dengan kemampuannya sendiri. Namun, upaya memberi pesan tersebut juga terbentur dengan format program yang sebelumnya telah dikondisikan. Media massa sebagai sebuah entitas yang mengandung unsur ekonomi dan politik tentu memiliki tujuan tersendiri dalam menggulirkan suatu wacana, dalam hal ini mengenai wacana kepemimpinan perempuan.

Dalam teori konstruksi sosial atas realitas yang dibangun oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dijelaskan bahwa konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui tiga proses sosial, yaitu eksternalisasi, obyektivasi,

dan internalisasi. Namun, pada perkembangan masyarakat yang semakin modern, pendekatan konstruksi sosial atas realitas yang sebelumnya tidak memasukkan media massa sebagai fenomena yang berpengaruh kini telah direvisi. Dalam konstruksi sosial media massa, sirkulasi informasi terjadi sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis (Bungin, 2011: 194).

Pencitraan dalam program Metro TV edisi Kartini Pemimpin Negeri tersebut dianalisis menggunakan wacana kritis. Dalam hal ini, apa yang ditampilkan dalam program tersebut mengandung berbagai unsur kompleks yang melatarbelakanginya, bukan hanya bahasa tetapi juga meliputi praktik yang berhubungan dengan tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Sehingga dalam menganalisa program tersebut peneliti merasa tepat untuk melakukan analisis menggunakan analisis wacana kritis.

Peneliti menggunakan analisa wacana kritis Teun A. van Dijk untuk membedah struktur teks yang terdapat dalam program karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan atau menandakan sejumlah makna, pendapat, dan ideologi. Wacana van Dijk dapat membongkar bagaimana makna tersembunyi dari teks. Proses memaknai teks tersebut akan menjelaskan proses teks tersebut diproduksi oleh individu maupun kelompok pembuat teks. Sehingga terdapat beberapa tingkatan untuk menganalisis teks yakni struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Seluruh elemen tersebut saling berhubungan dan saling memperkuat satu sama lain dan akan memberikan jalan untuk mengungkap peristiwa. Peristiwa yang hadir dalam teks bukan hanya dianggap sebagai cara berkomunikasi tetapi juga untuk mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi hingga menyingkirkan lawan (Eriyanto, 2012: 227).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan terkait dengan pencitraan kepala daerah perempuan dalam program televisi. Hal ini dirasa menarik untuk diteliti sebab para kepala daerah perempuan berupaya membangun citra dirinya di tengah konstruksi sosial media massa yang kerap kali memandang sebelah mata atas sepak terjang mereka dalam dunia politik dan bagaimana media massa mengkonstruksikan citra kepala daerah perempuan sebagai salah satu bukti perjuangan emansipasi.

Gambar 1.1
Potongan Tayangan Program “Kartini Pemimpin Negeri”



Sumber : www.metrotvnews.com

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Wacana Kritis Pencitraan Kepala Daerah Perempuan dalam Program *Special Event* “Kartini Pemimpin Negeri” di Metro TV 30 April 2016”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sesungguhnya terdapat banyak permasalahan yang dapat diteliti dalam kepemimpinan perempuan dalam bidang politik. Namun, peneliti tertarik untuk memilih rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai bagaimanakah wacana pencitraan kepala daerah perempuan yang tergambarkan dalam program ‘Kartini Pemimpin Negeri’. Fokus penelitian tersebut berfungsi untuk membatasi penelitian agar berjalan dengan sistematis.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan menjelaskan penggambaran kepala daerah perempuan dalam program “Kartini Pemimpin Negeri” yang terkait dengan politik pencitraan di media massa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan tentang wacana pencitraan kepala daerah perempuan dalam program “Kartini Pemimpin Negeri” tersebut menggunakan analisis wacana Teun A. van Dijk.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang peneliti gunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian. Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kajian ilmu komunikasi.
2. Referensi tinjauan ilmiah untuk penelitian berikutnya mengenai wacana kritis dalam kaitannya dengan komunikasi politik.
3. Penelitian juga diharapkan mampu menjadi rujukan untuk semua pihak yang sedang atau akan melakukan kajian dibidang ilmu komunikasi. Serta dapat memberikan informasi mengenai analisis wacana kritis dalam komunikasi politik. Sekaligus sebagai sarana latihan dalam menganalisis sebuah fenomena atau situasi.

1.4.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memenuhi syarat untuk kelulusan dalam studi yang dilakukan oleh peneliti dan dapat menjelaskan tentang para kepala daerah dalam melakukan pencitraan dalam program televisi dalam kedudukannya sebagai perempuan. Serta membuat khalayak mampu memahami bahwa keberadaan perempuan dalam komunikasi politik yang selama ini dikonstruksi oleh media tidak boleh diterima begitu saja, tetapi dapat ditelaah dengan aspek yang lebih berimbang. Sekaligus dapat memacu peningkatan kualitas perempuan dalam komunikasi politik.

1.5 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data berupa tayangan program *special event* Kartini Pemimpin Negeri dari Metro TV edisi 30 April 2016 dalam bentuk visual
- b. Mengidentifikasi data berupa wacana atau tayangan program dengan cara observasi visual

- c. Menganalisis wacana atau tayangan program berdasarkan analisis wacana kritis menggunakan model van Dijk yang memuat tiga elemen struktur teks yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro
- d. Membuat simpulan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis wacana menggunakan model van Dijk yang sebelumnya telah dilakukan guna menjawab fokus penelitian

1.6 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dibuat oleh peneliti dilaksanakan selama bulan Agustus 2016 hingga bulan Januari 2017. Rincian kegiatan penelitian terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Waktu dan Tahapan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Menentukan topik penelitian dan judul						
2.	Mengumpulkan kajian penelitian terdahulu						
3.	Menyusun proposal penelitian						
4.	<i>Desk Evaluation</i>						
5.	Mengumpulkan dan mengolah data						
5.	Analisis dan interpretasi data						
6.	Menyusun hasil penelitian berupa skripsi						
7.	Sidang skripsi						

Sumber : Olahan Peneliti, 2016

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

Pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tahapan penelitian, dan sistematika penulisan.

Kedua adalah tinjauan pustaka, pada bab ini berisikan mengenai tinjauan skripsi terdahulu dan teori-teori yang menjadi landasan pokok permasalahan pada penyusunan skripsi sesuai dengan topik penelitian.

Ketiga yakni metode penelitian, pada bab ini berisikan mengenai paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, unit analisis, metode pengumpulan data, teknik keabsahan data serta teknik analisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

Keempat adalah hasil penelitian, pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang penelitian.

Kelima yaitu kesimpulan dan saran, pada bab ini berisikan mengenai simpulan dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran sebagai penguat data.